

**PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) PADA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



Oleh:

**INAYAH SALSABILA FAIZAH
NIM. 07011282025065**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) PADA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik

Oleh :

INAYAH SALSABILA FAIZAH
NIM. 07011282025065

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, April 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Lili Erina, M.Si.
NIP. 196612301992032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH (SIPD) PADA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 8 Mei 2024
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Lili Erina, M.Si
Ketua



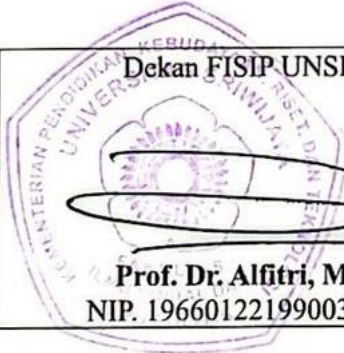
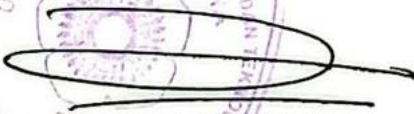

Dr. Nengyanti, M.Hum
Anggota



Lisa Mandasari, S.IP, M.Si
Anggota



Mengetahui,

 <p>Dekan FISIP UNSRI,  Prof. Dr. Alfitri, M.Si NIP. 196601221990031004</p>	<p>Ketua Jurusan  Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
---	---

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Inayah Salsabila Faizah

NIM : 07011282025065

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Yang Membuat Pernyataan

Palembang, 21 April 2024



Inayah Salsabila Faizah

NIM. 07011282025065

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.

Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-Nya”

- Ath Thalaq :2-3

Atas Ridha Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak Alm Ir. Afrizal dan Ibu Erna Sri Hartati**
- 2. Adik dan seluruh keluarga besar**
- 3. Pimpinan, Dosen, Staf dan Seluruh Civitas Akademika FISIP UNSRI**
- 4. Sahabat dan teman-teman seperjuangan**
- 5. Almamater kebanggaan saya, Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga diberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita hingga akhir zaman. Salam sayang kepada kedua orang tua saya tercinta, Alm. Ir. Afrizal dan Erna Sri Hartati. Terima kasih papa atas dukungan, kasih sayang, semangat dan doa yang diberikan kepada penulis semasa hidup hingga bisa mengantarkan penulis berada ditempat ini, walaupun pada akhirnya harus berjuang sendiri tanpa papa temani lagi. Terima kasih mama yang telah sabar dan berjuang dalam membesarkan penulis. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama sehingga mama selalu berada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh jenjang S-1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA dan Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
5. Ibu Dr. Lili Erina, M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak sekali arahan, masukan dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Unsri yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang membantu penulis dalam proses perkuliahan.
8. Kepala bagian, Kepala Sub Bagian dan Seluruh pegawai Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang telah membantu penulis selama magang hingga penelitian.
9. Ketiga adik saya Salwa, Sami dan Ghina yang selalu mendukung dan mendoakan dalam setiap hal yang penulis lakukan.
10. Kepada Muhammad Fariz dan Adinda Sholiah yang selalu menemani, meluangkan waktu dan memberi semangat kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini.
11. Sahabat dan teman dekat penulis yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam proses hingga penyelesaian penelitian ini yaitu Jani, Iza, Ocha dan Dinda.

12. Teman-teman seperjuangan satu bimbingan yang membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Seluruh pihak terkait yang telah membantu menyelesaikan proposal penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik dari isi maupun sistematika penulisan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan penelitian.

Palembang, 1 Maret 2024



Inayah Salsabila Faizah
NIM.07011282025065

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang. Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *e-government* yang menyatakan bahwa untuk mengukur sukses atau tidaknya digitalisasi pada sektor publik dinilai dari beberapa aspek yang disebut elemen sukses terdiri dari *Support*, *Capacity*, dan *Value* (Indrajit, 2016:11), yang dielaborasi dengan Aspek Pelaksanaan SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang belum berhasil karena masih belum memenuhi aspek pada elemen sukses pelaksanaan *e-government* yaitu penyesuaian referensi yang belum memiliki aturan tetap dan jaringan *server* yang masih bermasalah. Sehingga, perlunya komitmen dari pemerintah untuk menetapkan aturan mengenai kode referensi dan memperbaiki jaringan *server* agar pelaksanaan SIPD dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Aplikasi, E-government, SIPD

Pembimbing



Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001

Indralaya, 1 Mei 2024

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA

NIP. 1969111019994011001

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in the Finance Section of the Palembang City Regional Secretariat. This research is based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 70 of 2019 concerning Local Government Information System. The theory used in this research is e-government theory which states that to measure the success or failure of digitization in the public sector, it is assessed from several aspects called success elements consisting of Support, Capacity, and Value (Indrajit, 2016: 11), which are elaborated with aspects of SIPD implementation based on Permendagri Number 70 of 2019. The research method used is qualitative research with data collection techniques using observation, interviews and documentation. Based on the results of the research, the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in the Finance Section of Palembang City Regional Secretariat Section has not been successful because it still does not meet the aspects of the successful elements of e-government implementation, namely reference adjustments that do not yet have fixed rules and server networks that are still problematic. So, the need for commitment from the government to establish rules regarding reference codes and improve server networks so that the implementation of SIPD can run effective and efficient.

Keywords : Implementation, Application, E-government, SIPD

Pembimbing



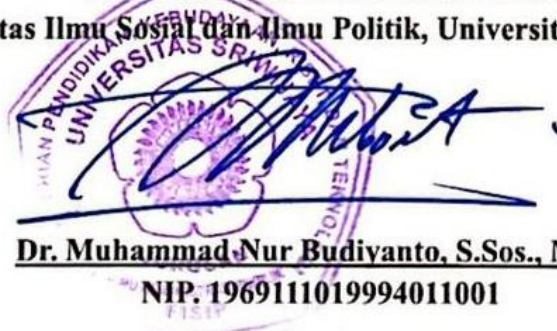
Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001

Indralaya, 1 Mei 2024

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya



Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA

NIP. 1969111019994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pelaksanaan Aplikasi	7
2.2 <i>Electronic Government</i>	9
2.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).....	14
2.3.1 Pengertian SIPD	14
2.3.2 Tujuan SIPD	15
2.3.3 Manfaat SIPD.....	16
2.3.4 Isi SIPD	17
2.3.5 Aspek Pelaksanaan SIPD	18
2.3.6 Mekanisme SIPD	20
2.4 Laporan Keuangan	24
2.5 Teori yang digunakan	25
2.6 Penelitian Terdahulu	26
2.7 Kerangka Pemikiran	34

BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Definisi Konsep	36
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Informan Penelitian	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.8 Teknik Keabsahan Data	45
BAB IV	46
PEMBAHASAN	46
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	46
4.1.1 Sejarah Singkat Sekretariat Daerah Kota Palembang	46
4.1.2 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	46
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	48
4.1.4 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang	49
4.1.5 Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Palembang.....	53
4.2 Informan Penelitian	54
4.3 Hasil Penelitian.....	55
4.3.1 Analisis Support (dukungan) dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bagian Keuangan Sekretriati Daerah Kota Palembang.....	56
4.3.2 Analisis Capacity (kapasitas) dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.....	69
4.3.3 Analisis <i>Value</i> (nilai) dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang	79
BAB 5	87
PENUTUP.....	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	38
Tabel 4. 1 Informan Penelitian	55
Tabel 4. 2 Daftar User SIPD Pada Bagian Keuangan	71
Tabel 4. 3 Sarana dan Prasarana pada Bagian Keuangan.....	77
Tabel 4. 4 Matriks Hasil Penelitian	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tampilan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	2
Gambar 2. 1 Laman Masuk SIPD	20
Gambar 2. 2 Halaman Dashboard SIPD	21
Gambar 2. 3 Menu Referensi	22
Gambar 2. 4 Tampilan Input Pendapatan	22
Gambar 2. 5 Tampilan input belanja dan modal	23
Gambar 2. 6 Menu Arsip	23
Gambar 2. 7 Tampilan hasil input komponen	24
Gambar 2. 8 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang	52
Gambar 4. 3 Transformasi SIPD terbaru	60
Gambar 4. 4 Sosialisasi SIPD kepada pegawai Bagian Keuangan	63
Gambar 4. 5 Contoh Pra RKA	65
Gambar 4. 6 Daftar Kode Belanja Daerah pada SIPD	68
Gambar 4. 7 Menu User SKPD pada SIPD	72
Gambar 4. 8 Daftar alokasi dana pada Bagian Keuangan	76
Gambar 4. 9 Sumber daya infrastuktur pada bagian keuangan	78
Gambar 4. 10 Hasil data <i>entry</i> SIPD	81
Gambar 4. 11 Data Input Kegiatan Belanja	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah	93
Lampiran 2. SK Dosen Pembimbing Skripsi	99
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Seminar Proposal	101
Lampiran 4. Lembar Pengesahan Seminar Proposal.....	102
Lampiran 5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal	103
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....	104
Lampiran 7. Pedoman Wawancara.....	106
Lampiran 8. Pedoman Observasi	109
Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara	112
Lampiran 10. Bukti Turnitin UNSRI	115
Lampiran 11. Bukti Lulus SILUET UNSRI.....	116
Lampiran 12. Kartu Studi Mahasiswa.....	116
Lampiran 13. Forlap Dikti	117
Lampiran 14. Kartu Bimbingan Ujian Komprehensif.....	118
Lampiran 15. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif	119
Lampiran 16. Surat <i>Similarity</i>	121

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

ASB	: Analisis Standar Belanja
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
G2B	: <i>Government to Business</i>
G2C	: <i>Government to Citizen</i>
G2G	: <i>Government to Government</i>
HSPK	: Harga Satuan Pokok Kegiatan
IT	: <i>Information and Technology</i>
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
LPPD	: Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
NIP	: Nomor Induk Pengguna
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
SBU	: Standar Biaya Umum
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SSH	: Satuan Satuan Harga
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era *sound governance*, kecepatan dan ketepatan dari kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu keharusan. Organisasi publik membutuhkan sebuah alat yang canggih dan kemampuan yang prima dari sumber daya manusia untuk mempercepat proses kinerja. Alat yang canggih dalam organisasi publik disebut dengan digitalisasi. Digitalisasi merupakan inovasi dalam pelaksanaan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital agar terciptanya pemerintahan yang responsif, inovatif dan kolaboratif. Digitalisasi bisa diwujudkan dalam sebuah sistem atau aplikasi yang berbentuk *website* (Nurrrahman *et al*, 2021:79).

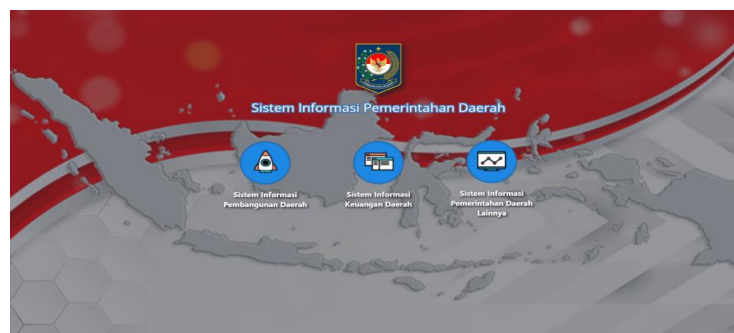
Website merupakan sejumlah halaman *web* yang memiliki topik saling terkait antara satu halaman dengan halaman lainnya yang biasanya ditempatkan pada sebuah *server web* yang dapat di akses melalui jaringan internet (Susilowati, 2019:36). Aplikasi berbentuk *website* bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Terciptanya *website* merupakan bentuk perwujudan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disebut dengan *electronic government*. *E-government* menjadi peluang bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Istilah *E-Government* merujuk kepada penggunaan teknologi informasi oleh organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan (Kase dalam Nugraha, 2018:35). *E-Government* merupakan bentuk penerapan

pelayanan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan komunikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan publik yang membutuhkan proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat (Huda, 2022:3). Pelaksanaan *e-government* diharapkan dapat membuat seluruh kegiatan pemerintahan dilaksanakan secara elektronik sehingga mempermudah fungsi kebijakan dan pelayanan.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan salah satu inovasi dari pengembangan *e-government* di Indonesia. SIPD yaitu sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD juga berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien (Salain *et al*, 2022:2). Menggantikan Permendagri No 98 Tahun 2018, kemudian sekarang ditetapkanlah ketentuan penerapan berbentuk Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Gambar 1. 1 Tampilan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)



Sumber: official website SIPD Sekretariat Daerah Kota Palembang (2023)

SIPD dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. SIPD

memiliki fungsi penting dalam mengelola dan menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna memperoleh hasil terhadap persoalan daerah, pemerintahan yang lebih responsif, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah, serta dapat mendorong transparansi serta keterbukaan bagi publik di setiap daerah (Sudianing, 2019:16).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Indonesia termasuk Kota Palembang diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan. Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sekretariat Daerah Kota Palembang memiliki tugas untuk penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kota Palembang dan fungsinya sebagai koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah kota aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah kota.

Dalam struktur Sekretariat Daerah terdapat Bagian Perencanaan dan Keuangan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD sudah digunakan sejak tahun 2022 dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kota Palembang. SIPD menyediakan informasi secara mandiri berupa pengelompokkan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Sehingga dengan adanya SIPD, laporan pengelolaan keuangan menjadi lebih

sederhana, mudah dipantau, mudah diawasi dan transparan serta terciptanya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan dan akuntabel.

“Sebelum adanya sistem yang berbasis website, penyusunan laporan keuangan pada bagian keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang dilakukan secara manual dengan berbagai formulir atau format akuntansi secara tertulis maupun terkomputerisasi (computerized). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah seperti tidak sinkronnya data antar komponen laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan tidak detail yang berdampak kepada rendahnya kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain tidak efisien, proses secara manual ini juga berpotensi terjadi kesalahan dalam menginput data atau memproses data” (Wawancara, 17/10/2023).

SIPD diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan keterandalan informasi keuangan dengan sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi serta meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penginputan data pada laporan keuangan agar menjadi lebih akurat. SIPD dibentuk untuk memudahkan SKPD dalam menyampaikan informasi berbentuk dokumentasi administrasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mampu menjembatani kebutuhan satu data keuangan seluruh pemerintah daerah secara nasional (Dewi *et al*, 2023:191).

Permasalahan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga sudah dibahas oleh para peneliti. Dari 15 jurnal atau artikel serta penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis, masalah yang paling banyak terjadi mengenai SIPD yaitu terkendala jaringan *server* yang sering *error* saat digunakan (Pramana *et al*, 2022). Hal serupa juga ditemui dalam penelitian (Adisi & Sadad, 2022:4) bahwa sulit akses ke *server* yang masih sering *error* serta masih banyak perbaikan dan pengembangan dalam pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah khususnya dalam sistem keuangan daerah. Hal ini juga disebabkan karena keterjangkauan jaringan yang belum bisa mengakses di beberapa daerah tertentu. Selain masalah *server*; keterbatasan

jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi masalah yang terjadi pada pelaksanaan SIPD (Sutisna *et al*, 2022). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Balqis *et al*, 2021) yang menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman pengetahuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola aplikasi SIPD. Sumber Daya Manusia masih belum siap akan penggunaan aplikasi yang berbasis website.

Melihat fenomena ini peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam pada bagian keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang mengingat pentingnya Inovasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam digitalisasi laporan keuangan agar mempermudah, mempercepat dan memperlancar dalam menginput data mengenai keuangan. Peneliti menggunakan elemen sukses menurut riset dari *Harvard JFK School of government* (dalam Indrajit, 2016 : 11) dimana untuk melaksanakan konsep-konsep digitalisasi pada organisasi publik, terdapat tiga aspek yang harus dimiliki *e-government* yaitu *support*, *capacity* dan *value*.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan SIPD terutama dalam penyampaian laporan keuangan yang agar lebih transparan, efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Sekretariat Daerah Kota Palembang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah manfaat, ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang Ilmu Administrasi Publik, sebagai sumber informasi maupun referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan penerapan *e-government* di Indonesia melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang dan pemerintah terkait untuk menjadi bahan evaluasi agar lebih baik di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. A. (2020). *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. AE Publishing.
- Anghayani, A., & Eltivia, N. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) terhadap Transaparansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah. *JUDICIOUS*, 3(2), 364-369.
- Akhiruddin et al. (2023). Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dengan Metode End-User Computing Satisfaction (EUCS). *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer*, 9(2), 834-848.
- Chinda Aqhni Adisi, & Abdul Sadad. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), 150–164.
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2), 151–164.
- Darmawan Sutisna, I., Dwiputrianti, S., & Rahman, A. (2022). Model Implementasi Penyusunan Anggaran Belanja Pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung. *JRPA - Journal of Regional Public Administration*, 7(1), 28–40.
- Fahzura, L., & Najamudin. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 7-13.
- Hardani, et.al. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup
- Huda, N., & Meiwanda, G. (2022). Sound Governance Pada Aplikasi E-Samsat Provinsi Riau. *Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 4(1). 90-104.
- Indrajit, Richard E. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Yogyakarta: Andi.

- Inzany, R. (2022). Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian(JIP)*, 2(10), 3573-3588.
- Iqbal, M. M., et al. (2021). Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(2), 173-185.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan E-Government dalam pelayanan publik (Studi kasus : Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 102.
- Mutiah, R. A. (2019). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 223–229.
- Nasution, M.I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Nugraha, J. T. (2018). *E-Government Dan Pelayanan Publik* (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di pemerintah kabupaten sleman), 2(1), 32-42
- Nurrahman, A., Dimas, M., Ma'sum, M. F., & Ino, M.F. (2021). Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Garut. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(1), 78-95.
- Pramana, A. et al. (2023). Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 9(1), 48.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang SIPD
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2019 tentang Laporan Keuangan.
- Pramana, A. et al. (2023). Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 9(1), 48.

- Ratu, C., Agung, T, & Lala, M. (2022). Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan SIPD, 10(12), 651-664.
- Salain, P. P. P., & Wedana, I. K. J. (2023) Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (SINEMA)*, 2(1). 453-458.
- Saldana, Miles & Huberman. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. America : SAGE Publications.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K.A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, Vol. 11, No. 2.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, Y. (2019). *E-Commerce for Teaching Factory (for Teachers)* (H. Purnama, ed.). Mutiara.
- Wahyuni, S. et al. (2022). Desain Aplikasi Game Edukasi. *Jurnal dharmawangsa*. 16(4). 758-768.
- Wirawan, S. (2020). Penerapan E-Government dalam menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. 1(1).
- Wilansari, I. E. Jumiati, & L. Agustino. (2022). Implementasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 2(1), 1-9.